

BAB I

ASAL USUL LAHIRNYA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA

A. Pengertian dan Unsur Ideologi

Sebelum memahami pancasila sebagai ideologi terbuka, penulis mencoba menjelaskan secara terperinci mengenai pengertian dan unsur ideologi. Kata Ideologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu dengan kata "*idea*" yang berarti gagasan, pengertian. Kata kerja dari bahasa Yunani, yaitu "*oida*" yang berarti mengetahui, melihat dengan budi. Kata "*logi*" yang berasal dari bahasa Yunani "*logos*" yang artinya pengetahuan. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan pengetahuan tentang ide-ide (*science of ideas*). Dalam perkembangannya, terdapat pengertian Ideologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Tracy yang merupakan warga negara Perancis pada tahun 1796. Menurut Tracy, ideologi yaitu '*science of ideas*' suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional.

Beberapa pakar di antaranya seperti Karl Marx, mengartikan Ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Sementara menurut Gunawan Setiardjo, mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.

Ramlan Surbakti mengemukakan ada dua pengertian Ideologi, yaitu Ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural. Secara fungsional diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik, sedangkan secara fungsional ini digolongkan menjadi dua tipe yaitu Ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmatis.

Ideologi yang doktriner bilamana ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi itu dirumuskan secara sistematis, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah. Sebagai contohnya adalah komunisme, yang mana ideologi yang pragmatis apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci, namun dirumuskan secara umum hanya prinsip-prinsipnya, dan ideologi itu disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama, dan sistem politik.

Pelaksanaan ideologi yang pragmatis tidak diawasi oleh aparat partai atau aparat pemerintah, melainkan dengan pengaturan pelembagaan (*internalization*) yang contohnya adalah individualisme atau liberalisme. Ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem pembenaran seperti

gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa.

Notonegoro sebagaimana dikutip oleh Kaelan mengemukakan bahwa ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri:

1. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan;
2. Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan, dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen (keterikatan) untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang maka akan semakin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen itu tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang mengikat yang harus ditaati dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi ataupun masyarakat.

Dengan demikian, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam ilmu-ilmu sosial dikenal dua pengertian mengenai ideologi, yaitu:

1. Pengertian Ideologi Secara Fungsional

Ideologi secara fungsional diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik.

2. Pengertian Ideologi Secara Struktural

Ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem pembenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa.

Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis dalam suatu sistem kenegaraan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri-ciri:

- a. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
- b. Ideologi mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan hidup, pegangan yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan, dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Adapun unsur yang terkandung dalam suatu ideologi adalah:

- a. Seperangkat gagasan yang telah disusun secara sistematis jelas dan mudah dipahami oleh seluruh kalangan akademisi, ilmuwan, maupun masyarakat pada umumnya.
- b. Pedoman tentang cara hidup yang baik dan benar serta terhindar dari berbagai hal-hal yang bersifat negatif kriminalitas.
- c. Tatanan yang hendak dituju oleh suatu kelompok.
- d. Dipegang teguh oleh kelompok yang meyakinkannya.

B. Hakikat, Fungsi, dan Tipologi Ideologi

1. Hakikat Ideologi

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Karena pada prinsipnya ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat.

Sebagai ideologi, Pancasila mencangkup pengertian tentang ide, gagasan, konsep, dan pengertian dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila adalah sebagai berikut:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama pada Pancasila mengandung nilai spiritual, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia.

Nilai religius yang terkandung pada sila pertama, yaitu keterikatan individu dengan suatu hal yang dianggapnya mempunyai kemampuan sakral, suci, agung, dan mulia. Mengerti ketuhanan jadi pandangan hidup utama umat Islam untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mempunyai jiwa maupun motivasi untuk meraih rida Tuhan dalam tiap-tiap perbuatan baik yang dikerjakannya.

Dari sudut pandang etis keagamaan, negara berdasar ketuhanan yang maha esa itu yaitu negara yang menjamin

kemerdekaan setiap penduduk suatu negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdasarkan *basic* ini juga bahwa satu keharusan untuk masyarakat warga Indonesia jadi masyarakat yang beriman pada Tuhan, dan masyarakat yang beragama, apa pun agama dan kepercayaan mereka.

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua ini mengandung nilai kesamaan derajat maupun hak dan kewajiban, cinta-mencintai, hormat-menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi, dan gotong-royong. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang berarti pembentukan suatu kesadaran perihal kedisiplinan, karena tiap-tiap manusia memiliki potensi untuk jadi manusia prima, yakni manusia yang beradab.

Manusia yang maju peradabannya pasti lebih gampang terima kebenaran dengan tulus, lebih barangkali buat mengikuti tata langkah dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, dan mengetahui hukum universal. Kesadaran inilah sebagai motivasi membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk meraih kebahagiaan dengan usaha gigih dan bisa diimplementasikan di dalam wujud sikap hidup yang serasi penuh toleransi dan damai.

Lain halnya dengan peradaban dalam Islam yang diturunkan sebagai *din* sejatinya telah memiliki konsep seminalnya sebagai peradaban, sebab kata *din* itu sendiri telah membawa makna keberutangan, susunan kekuasaan, struktur hukum, dan kecenderungan manusia untuk membentuk masyarakat yang menaati hukum dan mencari pemerintah yang adil.

Dalam istilah lain yang mungkin dipahami oleh pembaca, kata *din* itu sendiri tersembunyi suatu sistem kehidupan. Oleh sebab itu, ketika *din* (agama) Allah yang bernama Islam itu telah disempurnakan dan dilaksanakan di suatu tempat, maka tempat itu diberi nama Madinah.

Dari akar kata *din* dan Madinah ini lalu dibentuk akar kata baru *madana* yang berarti membangun, mendirikan kota, memajukan, memurnikan, dan memartabatkan. Tanda wujudnya peradaban menurut Ibn Khaldun adalah berkembangnya ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, geometri, aritmetik, astronomi, optik, kedokteran, dan sebagainya. Bahkan maju mundurnya suatu peradaban tergantung atau berkaitan dengan maju mundurnya ilmu pengetahuan.

Namun di balik faktor aktivitas dan kreativitas masyarakat masih terdapat faktor lain, yaitu agama, spiritualitas, atau kepercayaan. Para sarjana muslim kontemporer umumnya menerima pendapat bahwa agama adalah asas peradaban, menolak agama adalah kebiadaban.

Sayyid Qutb menyatakan bahwa keimanan adalah sumber peradaban meskipun dalam peradaban Islam struktur organisasi dan bentuknya secara material berbeda-beda, namun prinsip-prinsip dan nilai-nilai asasinya adalah satu dan permanen. Prinsip-prinsip tersebut adalah ketakwaan kepada Tuhan (takwa), keyakinan kepada keesaan Tuhan (tauhid), supremasi kemanusiaan di atas segala sesuatu yang bersifat material, pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan penjagaan dari keinginan hewani, penghormatan terhadap keluarga, menyadari fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi berdasarkan petunjuk dan perintah-Nya (syariat).

c. Sila Persatuan Indonesia

Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik mengandung nilai persatuan bangsa dan persatuan wilayah yang merupakan faktor pengikat yang menjamin keutuhan nasional atas dasar Bhineka Tunggal Ika. Nilai ini menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Persatuan yaitu paduan yang terdiri atas bagian-bagian, kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan hanya untuk bersengketa. Bangsa Indonesia ada untuk mewujudkan kasih sayang pada seluruh suku bangsa dari Sabang sampai Merauke.

Persatuan Indonesia, bukan hanya sesuatu sikap ataupun pandangan dogmatik dan sempit, tetapi kudu jadi usaha untuk lihat diri sendiri dengan lebih objektif dari dunia luar. Negara kesatuan republik Indonesia terbentuk di dalam proses histori perjuangan panjang dan terdiri dari berbagai macam kelompok suku bangsa, tetapi perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan namun justru jadikan persatuan Indonesia.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan

Menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwujudkan oleh persatuan nasional yang nyata (*real*) dan wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan negara dan bangsa dengan mempertahankan penghargaan atas kepentingan pribadi dan golongan, musyawarah untuk mufakat, kebenaran, dan keadilan.

Jadi makhluk sosial, manusia memerlukan hidup berdampingan dengan orang lain, di dalam interaksi itu

umumnya terjadi kesepakatan, dan saling menghormati satu sama lain atas *basic* tujuan dan keperluan berbarengan. Prinsip-prinsip kerakyatan sebagai dambaan utama buat membangkitkan bangsa Indonesia, mengerahkan potensi mereka di dalam dunia moderen, yaitu kerakyatan yang dapat mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau ada di dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan. Hikmah kebijaksanaan yaitu keadaan sosial yang menampilkan rakyat berpikir di dalam *step* yang lebih tinggi jadi bangsa, dan membebaskan diri dari belenggu pemikiran berasaskan kelompok dan aliran spesifik yang sempit.

e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Mengandung nilai keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, penghargaan terhadap hak orang lain, gotong-royong dalam suasana kekeluargaan, ringan tangan dan kerja keras untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Nilai keadilan yaitu nilai yang menjunjung norma menurut ketidakberpihakan, keseimbangan, dan pemerataan terhadap satu perihai. Mewujudkan keadilan sosial untuk semua rakyat Indonesia adalah dambaan bernegara dan berbangsa. Itu seluruh berarti mewujudkan kondisi masyarakat yang bersatu dengan organik, di mana tiap-tiap anggotanya memiliki peluang yang sama untuk tumbuh dan berkembang dan studi hidup pada kekuatan aslinya. Semua usaha diarahkan pada potensi rakyat, memupuk perwatakan, dan peningkatan mutu rakyat, hingga kesejahteraan terwujud dengan merata.